



Ira Safitri¹
 Muhammad Yoga
 Pratama²
 Ramadani Shohiro
 Hasibuan³
 Nur Anisa Simbolon⁴
 Sri Yunita⁵

PERAN GURU PPKN MENTRANSFORMASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH (STUDI KASUS: PERAN GURU PPKN DI SMA NEGERI 5 MEDAN)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mentransformasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan peserta didik di SMA Negeri 5 Medan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai HAM diajarkan dan diterapkan melalui pembelajaran PPKn, serta dampaknya terhadap sikap dan perilaku siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan guru PPKn dan observasi terhadap proses pembelajaran dan interaksi siswa di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan secara efektif mentransformasi nilai-nilai HAM kepada siswa dengan mengajarkan konsep dasar HAM, mengaitkannya dengan hak dan kewajiban siswa, serta menangani pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai HAM, yang tercermin dalam sikap yang lebih hormat, disiplin, dan tanggung jawab. Penelitian ini mengindikasikan bahwa PPKn berperan penting dalam membentuk karakter siswa dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Transformasi Nilai, Pendidikan Karakter, Siswa, Sekolah Menengah, Pengajaran HAM.

Abstract

This study aims to explore the role of Pancasila and Civic Education (PPKn) in transforming Human Rights (HR) values among students at SMA Negeri 5 Medan. The main objective of this research is to identify how Human Rights values are taught and implemented through PPKn education, and their impact on students' attitudes and behaviors. The research method used is a qualitative approach with interview and observation techniques. Data were collected through interviews with PPKn teachers and observations of the learning process and student interactions at the school. The results show that PPKn teachers at SMA Negeri 5 Medan effectively transform HR values to students by teaching the basic concepts of Human Rights, relating them to students' rights and responsibilities, and addressing Human Rights violations within the school environment. Students demonstrated improved understanding and application of Human Rights values, reflected in more respectful, disciplined, and responsible attitudes. This study indicates that PPKn plays a crucial role in shaping students' character and enhancing their awareness of their rights and responsibilities as citizens.

Keywords: Human Rights (HR), Pancasila and Civic Education (PPKn), Value Transformation, Character Education, Students, Secondary School, HR Teaching.

PENDAHULUAN

Konsep pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang rumit, melibatkan pengajaran tentang perilaku, norma, serta ilmu pengetahuan. (Permana, B. S., dkk 2021:5). Pendidikan bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan individu sehingga bermanfaat bagi

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

email: irasafitri.3212111004@mhs.unimed.ac.id, nuranisa08@mhs.unimed.ac.id, ramahsb123@mhs.unimed.ac.id, yogapratama@mhs.unimed.ac.id, sr.yunita@unimed.ac.id

diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang positif dalam diri individu. Artinya bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan satu arah tujuan, akan tetapi banyak tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan, baik itu mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari peserta didik yang akan dicapai (Sinaga dkk, 2022:3).

Dalam tulisannya Parawangsa, E. dkk, (2021:5) menggambarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau sering disebut Pendidikan Kewarganegaraan, adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk membuat peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka, dengan semua itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dan tentunya selain dari adanya hak asasi yang perlu dihormati, terdapat pula makna akan adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Dimana kewajiban asasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan HAM untuk dapat terlaksana dan tegak.

Dan pengertian HAM juga dapat dilihat dari perspektif Tim ICCE UIN, 2003 yang menyatakan bahwa ciri pokok HAM adalah (Rosyada, dalam Damanik, N : 2024:6) :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Tetapi HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. HAM tidak boleh dilanggar. Dimana tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi ataupun melanggar hak orang lain. Orang akan tetap memiliki HAM meskipun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar HAM.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru berfungsi sebagai penyampai informasi deduktif tentang hak asasi manusia kepada peserta didik melalui komunikasi interaktif. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperlukan sebagai sarana bagi guru untuk mentransfer nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran PPKn, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam diri peserta didik.

Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud memaparkan bahwa HAM adalah materi dalam ruang lingkup mata pelajaran PPKn yang meliputi contoh kasus-kasus HAM, perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM, upaya penegakan HAM, partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia, dan HAM dalam Pancasila. Materi hak asasi manusia tersebut dibelajarkan dalam PPKn bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Yang dimana tujuannya adalah untuk mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini tentunya sesuai dengan misi dari mata pelajaran PPKn, yaitu sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara yang paham dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga Negara negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Magdalena dkk, 2020:2).

Dengan demikian, untuk mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia ini di dalam pembelajaran PPKn, maka peran dari guru PPKn sendiri sangatlah penting keberadaannya. Melihat peran guru PPKn dalam mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran PPKn menarik diamati dan dikaji dalam relasinya dengan upaya memperkuat pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik mengenai hak asasi manusia untuk membangun pemahaman dan kesadaran melaksanakan hak dan kewajibannya atas implementasi hak asasi manusia itu sendiri.

Peran guru PPKn dibutuhkan untuk menopang realisasi nilai-nilai HAM dengan PPKn secara maksimal. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran-peran guru PPKn, khususnya guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan untuk mentransformasi nilai-nilai HAM melalui pembelajaran PPKn. Tulisan ini berupaya mengetahui peran-peran guru PPKn, khususnya guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan dengan mentransformasi nilai-nilai HAM dalam kaitannya dengan realisasi pembelajaran PPKn. Melihat arsip pada isu mengenai pentingnya pemahaman peserta didik mengenai hak asasi manusia, dipandang menarik untuk peran guru PPKn mentransformasi nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 5 Medan.

METODE

Desain dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan koleksi data berdasarkan wawancara dan ragam data sekunder yang berkaitan dengan PPKn dan HAM. Dimana metode penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat. Atmaja (2020 : 20) mendripsikan bahwa pendekatan kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dialami. Dalam konteks ini mengetahui proses, aktivitas dan peristiwa akan menjadi langkah penting yang akan dilakukan.

Penelitian HAM dengan melihat peran guru PPKn mentransformasi nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PPKn terhadap nilai, wacana, cara mentransformasi nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PPKn dan dampak dari transformasi tersebut terhadap peserta didik merupakan ruang lingkup penelitian. Dalam konteks ini, eksistensi, peran dan tanggung jawab guru PPKn dalam relasi fungsionalnya untuk mentransformasi nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PPKn menjadi unit analisisnya. menitikberatkan Penelitian analisis ini terhadap peran-peran guru PPKn mentransformasi nilai-nilai dalam HAM dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 5 Medan, Jl. Pelajar No.17 Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu hal yang penting atau krusial keberadaannya dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara dalam suatu negara (Mangkey, R. A, 2022:10), dan karena keberadaannya yang begitu penting dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka keberadaannya harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan apalagi dirampas bahkan direnggut.

Keberadaan dari HAM sendiri tentunya tidak serta merta hadir, namun keberadaannya tidak terlepas dari sejarah panjang dan pada hakikatnya muncul dari inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan bahkan dari kezaliman. Oleh sebab itu, perkembangan mengenai perjuangan hak asasi manusia sesungguhnya sangat tergantung pada konteks daerah dan zamannya. Dengan demikian, walaupun hak asasi manusia bersifat universal namun corak dan hasil perjuangannya dimasing-masing tempat dan waktu memiliki perbedaan antara satu negara dengan Negara lainnya. Dimana dalam konteks ini adalah negara Indonesia.

Pengakuan HAM di Indonesia sebagai negara berkembang saat ini merupakan suatu hal yang penting keberadaannya. Sebab persoalan hak asasi manusia pada umumnya selalu terkait dengan masalah demokrasi dan pembangunan di negara. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelenggaraan negara merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. Salah satu ciri pokok negara yang menghormati hak asasi manusia adalah negara yang demokratis. Sebaliknya sebuah negara yang demokratis adalah negara yang menghormati hak asasi manusia.

Pelaksanaan supremasi hukum dan demokrasi, pendekatan hukum dan dialogis harus dikedepankan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menuju masyarakat yang demokratis. Apalagi Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum yang ada dan diberlakukan tentunya harus sesuai dengan hak asasi manusia.

Dan mengingat akhir-akhir ini sangat banyak isu-isu mengenai pelanggaran HAM, dan HAM sendiri belum terlaksana pelaksanaannya di Indonesia dengan baik, maka perlu adanya

peran dari masyarakat mudayaitu salah satunya para peserta didik yang harus memahami nilai-nilai hak asasi manusia di dalam kehidupannya agar hak asasi manusia dapat terimplementasi dengan baik.

Sehingga dengan hal yang demikian, diharapkan peserta didik sebagai warga muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia sebagai negara yang memahami serta melaksanakan hak asasi manusia dengan baik. Dan pelanggaran-pelanggaran yang ada akhirnya dapat diminimalisir keberadaannya.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik. Pada dasarnya PPKn merupakan studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia.

Dan secara universal, adapun beberapa manfaat yang wajib diikuti oleh semua peserta didik dan pendidik sendiri mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, yaitu (Rahayu, 2019:6) :

1. Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila .
3. Membantu individu untuk mencintai negara Indonesia.
4. Agar individu dapat berperilaku sesuai dengan isi dari butir-butir Pancasila.
5. Individu dapat mengamalkan Pancasila disegala situasi.
6. Pedoman menjadi warga negara yang baik.
7. Memahami ideologi bangsa Indonesia.
8. Membangun karakter warga negara yang bermartabat.
9. Mewujudkan kehidupan bermoral dalam kehidupan.

C. HAM dan PPKn

HAM dan PPKn merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan HAM sendiri adalah materi muatan yang diajarkan di dalam pembelajaran PPKn. Sehingga ketika mempelajari PPKn, maka HAM juga akan turut dipelajari. Mengambil pemikiran Hamid (2021:5) PPKn sendiri merupakan mata pelajaran wajib yang mesti diajarkan kepada peserta didik pada tingkat sekolah dasar dan menengah agar menjadi warga negara yang baik, cerdas, dapat diandalkan serta menjadi warga negara muda yang ideal (yaitu warga yang tahu akan hak dan kewajibannya). Tentunya ini sangat sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam hak asasi manusia.

Keberadaan dari PPKn sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar dan menengah, itu telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya dalam Pasal 37 yang berisi:

" Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya;. h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; j. muatan lokal."

Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwasanya HAM dan PPKn adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan berkesinambungan satu dengan yang lain, dimana PPKn adalah kendaranya dan HAM adalah muatan materinya. Untuk itu, tepatlah dirasa bahwa PPKn dapat dijadikan sebagai salah satu wahana dalam mentransformasi nilai-nilai HAM kepada siswa agar membentuk siswa yang tahu akan hak dan kewajibannya dalam lingkungan sekolah pada khususnya dan menjadi warga negara yang baik pada umumnya. Tentunya agar PPKn dapat menjadi wahana dalam mentransformasi nilai-nilai HAM tersebut, maka peran guru PPKn sangatlah penting keberadaannya untuk merealisasikan itu semua.

D. Peran Guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan Mentransformasi Nilai-nilai HAM Kepada Peserta Didik di Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 5 Medan, Jl. Pelajar No.17 Medan, dimana guru PPKn SMA Negeri 5 Medan mentransformasi nilai-nilai HAM melalui pembelajaran PPKn adalah dengan cara mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai hak asasi

manusia pada setiap peserta didik nya. Peran yang diperlihatkan oleh guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan adalah dengan mengajarkan terlebih dahulu hak asasi manusia dari hal-hal yang dasar. Baik itu dari pengertian, contoh- contoh hingga kepada bentuk dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini dilakukan oleh guru PPKn terlebih dahulu agar para siswa memahami betul akan hak asasi manusia itu sendiri. Dan di samping itu, guru PPKn di SMA Negeri 5 Medan juga menyampaikan hak-hak serta kewajiban yang mesti dimiliki oleh setiap siswa di sekolah tersebut. Seperti salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Dan kewajiban dalam menaati aturan - aturan yang ada di sekolah.

Dan ketika ada pelanggaran HAM ringan seperti pembulian terhadap seorang siswa oleh teman- temannya, guru PPKn SMA Negeri 5 Medan memberikan upaya penyelesaian pelanggaran yang ada dengan melakukan pendekatan untuk menasehati siswa yang melakukan pembulian kepada temannya, bahwasanya hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia bagi temannya yang dibully. Di lingkungan sekolah, penting untuk saling menghargai dan tidak saling mengejek atau memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Hal ini merupakan cerminan dari pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia. Siswa diharapkan menunjukkan rasa hormat terhadap kakak kelas atau guru, misalnya dengan menyapa saat bertemu, membungkukkan badan saat lewat di depan guru, dan melakukan hal-hal lainnya yang menunjukkan penghormatan.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 5 Medan berperan penting dalam mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan teladan melalui sikap yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Guru PPKn memastikan pembelajaran yang adil untuk semua peserta didik tanpa membedakan. Ketika siswa melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mereka akan diberikan sanksi yang sesuai. Sebaliknya, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan baik dan menunjukkan sikap positif akan mendapatkan reward sebagai bentuk apresiasi.

Dalam proses pembelajaran, guru PPKn selalu mengingatkan siswa untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban mereka. Siswa diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan mempertanggungjawabkan hak yang telah didapatkan. Ini bertujuan agar mereka menjadi warga muda yang ideal, yaitu yang memahami hak dan kewajiban mereka. Diharapkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang diajarkan akan menjadi bekal bagi siswa untuk hidup dengan baik di masyarakat dan negara setelah mereka tamat dari sekolah.

Transformasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 5 Medan telah membawa perubahan positif. Siswa yang awalnya hanya mengetahui hak-haknya kini juga memahami kewajibannya. Perubahan ini tercermin dalam sikap mereka yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan disiplin. Mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati aturan di sekolah, serta menghargai hak teman-teman dan warga sekolah lainnya.

Selama penulis melakukan penelitian di sekolah tersebut, terlihat bahwa siswa menunjukkan perilaku positif seperti menyapa, memberikan senyuman, dan membungkukkan badan saat berpapasan. Di lapangan sekolah, peserta didik saling menghargai perbedaan yang ada. Penulis merasa bahwa peran guru PPKn dalam mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia di SMA Negeri 5 Medan telah memberikan hasil yang baik.

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek fundamental yang harus dilindungi dan dihargai, sebagai bagian dari martabat dan hak setiap individu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berfungsi sebagai sarana penting dalam mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai HAM kepada peserta didik. Melalui kurikulum PPKn, siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka tetapi juga belajar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian di SMA Negeri 5 Medan menunjukkan bahwa peran guru PPKn sangat krusial dalam mentransformasi pemahaman HAM ke dalam praktik yang nyata, menghasilkan siswa yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Implementasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan mendukung perkembangan karakter positif siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, A. K., & Rahmawati, A. Y. 2020. Urgensi Inklusifitas Pelaksanaan Dakwah di Tengah Problematika Sosial. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(2), 203-215.
- Damanik, N. 2024. Human Rights In Muslim And Non Muslim Countries HAM Di Negara Muslim Dan Non Muslim. *Jurnal Al-Harakah*, 6(01).
- Hamid, S. I., Dewi, D. A., Salsabila, H., Nurnazhiifa, K., & Sati, L. 2021. Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Keberhasilan Pelajaran PKn dalam Membangun Rasa Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5288-5295.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. 2020. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar negri Bojong 3 Pinang.
- Mangkey, R. A. 2022. Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(1).
- Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. 2021. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar (SD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8050-8054.
- Permana, B. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. 2021. Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8651-8659.
- Rahayu, A. S. 2017. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) (Edisi Revisi ed.)*. (R. Damayanti, Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinaga, O., Gandamana, A., & Pendidikan Kewarganegaraan, T. D. 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Cetakan IV ed.)*. (O. Sinaga, Ed.). Medan: CV. Harapan Cerdas.
- Solihin, L., Pratiwi, I., Hijriani, I., Utama, B., & Gandasari, N. 2021. Membentuk warga negara yang demokratis: konstruksi literasi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn.